

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasari dengan Tap MPR No XV/MPR/1998 memiliki misi desentralisasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dua manfaat desentralisasi yaitu: mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan; serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling rendah (Shah, 1997) dalam (Mardiasmo, 2018). Untuk dapat mencapai kedua misi tersebut pemerintah daerah memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yang meliputi 11 prinsip yaitu: keterbukaan dan transparansi, tanggung jawab, responsif, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, anti korupsi, efisien dan efektif, kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan; serta inovasi untuk perubahan lebih baik (Susanto, Samopa, & Wibowo, 2018). Tata pemerintahan juga melibatkan tiga pilar utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rahman, 2018).

Bagi Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan wilayah mengartikan provinsi, kabupaten/kota selaku wilayah otonom, maksudnya wilayah memiliki kekuasaan buat mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan warga bersumber pada aspirasi rakyat dalam negeri kesatuan. sistem Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan terdapatnya otonomi wilayah hingga wilayah bisa mewujudkan pembangunannya sendiri serta mewujudkan kemampuan yang terdapat di daerahnya buat menggapai kebahagiaan warga Penyelenggaraan otonomi wilayah

didasarkan pada Ketetapan MPR No XV/MPR/1998 dengan tujuan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah. Diantara usaha buat mendesak terciptanya prinsip keterbukaan serta transparansi merupakan melaksanakan *e-Government* serta publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah (LKPD) di internet. Paragraf 9 Statment Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 menarangkan kalau laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan spesial buat sediakan data yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta mencerminkan akuntabilitas. Atensi terhadap transparansi di Indonesia diisyrati dengan diberlakukannya UU Nomor Keputusan Menteri Data serta Komunikasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik. Pasal 9 ayat UU KIP mengendalikan kalau data publik semacam data keuangan wajib diinformasikan lewat media yang gampang diakses oleh warga serta dengan bahasa yang tidak susah dimengerti. Hasilnya, pemerintah wilayah bisa menggunakan Internet selaku fasilitas penyebaran data yang dialami kilat serta real-time.

Diantara usaha untuk mendorong terciptanya prinsip keterbukaan dan transparansi adalah melakukan *e-Government* dan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di internet. Pelaksanaan *e-Government* pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha dan industri.

Menurut CNBC Indonesia, jumlah masyarakat Indonesia yang terhubung ke internet terus bertambah, bahkan kini internet menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%.

Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah informasi keuangan pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ

tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hal tersebut mendukung Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet. Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, Berisi deskripsi tentang latar belakang 9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD dalam pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Laporan keuangan yang baik berguna bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan sebuah keputusan (Alqurni, P; AD, Nindiasari, 2022).

Tabel 1 Publikasi LKPD Provinsi Lampung

Publikasi Online LKPD	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Ya	12	12	16
Tidak	4	4	0
Jumlah	16	16	16

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa banyak faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui media internet (*website*). Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah, jumlah penduduk dan opini audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet. Hal ini didasari oleh perilaku sebagai berikut, kekayaan daerah yang tinggi dapat dilihat dari tingginya PAD suatu daerah. Kekayaan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja Pemda yang baik sehingga menyebabkan Pemda ingin menunjukkan kepada *stakeholders* sebagai bentuk signal dari manajemen publik yang baik. Sedangkan dengan kekayaan daerah yang rendah menunjukkan kinerja Pemda yang buruk, sehingga menyebabkan Pemda untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat.

Publikasi LKPD menjadi salah satu saluran transparansi pemda kepada masyarakat. Reformasi pelaporan keuangan dan digitalisasi pada pemda telah dilakukan di seluruh dunia. Tentu saja peningkatan kapasitas keuangan tersebut

memerlukan sumber daya yang lebih baik. Seperti yang terjadi di Spanyol, (Fresneda Fuentes & Hernández Borreguero, 2018) menyatakan bahwa sumber daya yang memadai, pelatihan, software yang tepat, keterlibatan politik, serta ukuran pemda. Peraturan negara federal lebih banyak mempengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan swasta dibanding kebijakan akuntansi pemerintah daerah di USA (Foltin, 2017). Sementara di Canada, transformasi digital pada pemda akan membantu sektor swasta dalam pengembangan usaha mereka serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah (Pittaway & Montazemi, 2020).

Pengungkapan informasi daerah dalam website merupakan salah satu cara untuk mengurangi agency problem antara pemerintah dan masyarakat. Adanya hubungan antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal merupakan salah satu pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah membuat suatu sistem yang disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penelitian dengan menggunakan variabel keberadaan situs LPSE terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet belum pernah dilakukan sebelumnya. Adanya sistem LPSE diharapkan juga akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan cara memublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Nosihana & Yaya (2016) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet, ukuran pemda juga berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan. Namun penelitian Nosihana & Yaya (2016) tidak menemukan bukti bahwa rasio pembiayaan utang (*leverage*), kekayaan pemda, tipe pemda dan opini audit mempunyai pengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan, hasil dari penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Hudoyo, (2014) yang menemukan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet.

Putri & Setiawan (2022) mengungkapkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Martani, 2012) yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan dalam *website* Pemda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja daerah maka keinginan pemda untuk publikasi laporan keuangan semakin rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, sehingga memberi dampak buruk terhadap masyarakat, karena pembangunan infrastruktur publik tidak berjalan dengan maksimal. Menurut penelitian yang dilakukan (Alhajjriana et al., 2017) tentang faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* Pemda di Indonesia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah, jumlah anggota DPRD, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* Pemda, sedangkan belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

Belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung serta belanja untuk urusan wajib pemerintahan dan urusan pilihan memiliki tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta memberikan fasilitas yang layak kepada publik. Belanja daerah yang tinggi belum tentu mendorong pemda untuk melakukan publikasi laporan keuangan di *website* resminya. Hal tersebut terjadi karena adanya kemungkinan bahwa belanja daerah yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi juga. Jumlah penduduk yang semakin besar akan membuat biaya untuk memberikan informasi yang merata ke masyarakat semakin besar pula. Namun dengan adanya internet diharapkan informasi dapat disampaikan secara merata kepada seluruh penduduk. Pemeriksaan laporan keuangan akan dilakukan BPK untuk mendapatkan opini audit. Nantinya opini audit akan digunakan untuk alat pengukur kinerja dari suatu Pemda apakah kualitas akuntabilitas keuangannya baik atau tidak.

Hasil penelitian Alhajjriana et al., (2018) menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pemda. Sedangkan Pendapatan

daerah, Jumlah anggota DPRD dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting Pemda. Dan Internet Financial Reporting Pemda tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Nosihana & Yaya (2016) menunjukkan kompetisi politik dan Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting melalui *e-government*. Sedangkan, rasio pembiayaan utang (*Leverage*), kekayaan pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-Government*. Selain itu penelitian Saraswati et al., (2019) belanja daerah dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet. Sedangkan opini audit dan Keberadaan Situs LPSE tidak berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di internet.

Penelitian mereplikasi Yunita (2021) yang berjudul: “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah” dengan hasil yang bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah sedang berada dalam posisi transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik, di mana hal ini menunjukkan keberhasilan misi otonomi daerah. Terjadi trend kenaikan hasil opini audit serta publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Seluruh variabel tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Peta politik tidak menjadi penghambat kepala daerah dalam menegakkan transparansi pelaporan keuangan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan sampel penelitian dan variabel bebas yang diteliti yaitu kekayaan daerah, belanja daerah dan jumlah penduduk.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini yang digunakan menjadi Instansi Pemerintah Provinsi Lampung adalah bank dengan batasan sebagai berikut;

1. Penulisan ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.

2. Penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Di Internet Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet?
2. Apakah terdapat pengaruh Belanja Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet?
3. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet?
4. Apakah terdapat pengaruh Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Internet.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Khasiat dari riset ini buat pengembangan ilmu merupakan meningkatkan pengetahuan di bidang publikasi laporan keuangan pemerintah wilayah Lampung lewat media internet.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah Wilayah

Riset ini bisa dijadikan selaku bahan pertimbangan dalam serta diharapkan bisa jadi rujukan serta masukan dalam merumuskan publikasi keuangan lewat media internet.

b. Bagi penulis

Kami harap dapat menjadikan rujukan maupun selaku acuan riset selanjutnya bila memakai topik yang relevan dengan riset ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini membahas Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Di Internet

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup Metode Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Uji Persyaratan Instrumen, Uji Persyaratan Analisis Data, Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan penelitian, berupa pengujian model dan pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN